



PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR 2024



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2023



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

Pasal 4

Susunan dan sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Agustus 2023


WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

1. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
2. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
3. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2024
4. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
5. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
6. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2024
7. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
8. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2024
9. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2024
10. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
11. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
12. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2024
13. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
14. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
15. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2024
16. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
17. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2024
18. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
19. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
20. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024

21. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
22. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
23. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
24. RENJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2024
25. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
26. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
27. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
28. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
29. RENJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
30. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
31. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2024
32. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2024
33. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2024
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I Gusti Ngurah Jaya Negara', with a stylized flourish at the end.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, penyusunan Ranwal Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar Tahun 2024 dapat diselesaikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk wajib menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) Tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024.

Kami berharap Dokumen renja ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar serta mendukung dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Visi dan Misi Kota Denpasar sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, 7 Agustus 2023
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Denpasar

I Ketu Wisnu Wijaya Kusuma.ST.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR DIAGRAM.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika	5
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2022	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Bappeda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bappeda.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda	41
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
3. TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA	58
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Bappeda	59
3.3. Program dan Kegiatan	60
4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA	73
4.1. Program dan Kegiatan.....	73
5. PENUTUP	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Denpasar	14
Tabel II	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Denpasar	20
Tabel III	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	40
Tabel IV	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	44
Tabel V	Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	53
Tabel VI	Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	60
Tabel VII	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Denpasar	36
-----------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjutnya, kepala Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar Tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Penyusunan Renja ini selain mengacu pada Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah, dan mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran pembangunan serta dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalianm, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

- a. Penyusunan Persiapan
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir, dan
- f. Penetapan

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3465);
- b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- c. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- d. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1114);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
- q. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
- r. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
- s. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
- t. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah;
- u. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53).
- v. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode satu tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkup Bappeda Kota Denpasar sebagai bentuk cerminan penyelenggaraan pembangunan daerah. Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Tahun 2021 – 2026.

Didalam Rencana Kerja (RENJA) ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan dan akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Bappeda adalah:

1. Sebagai komitmen bagi Bappeda dalam melaksanakan program/kegiatan dan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu periode tahunan;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kota Denpasar selama tahun 2024;
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan pada tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bappeda, proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Bappeda dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat Penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bappeda,

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappeda, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, serta Tantangan dan peluang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan Bappeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN BAPPEDA

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappeda.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

Menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Denpasar

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah , dilaksanakan guna mengetahui program / kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Bappeda Kota Denpasar tahun 2022 didasarkan pada Renstra 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026, untuk mengetahui :

1. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya , terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah ; dan
3. Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor – factor penyebab tersebut.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA

Penyusunan Renja Bappeda sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Bappeda. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Evaluasi Kinerja Bappeda merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome

pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Ranwal Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kota Denpasar selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran. Selain itu, program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka program-program yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Tahun 2022 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah penjabaran dari program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dalam rangka mencapai outcome yang telah ditetapkan. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik berupa personil (SDM) barang/modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tahun 2022 adalah:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**
 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**
 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2.1.1. Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, diwujudkan melalui 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 18 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 11.043.341.331 ,- (Sebelas milyar empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

Secara umum Realisasi kegiatan Bappeda tahun 2022 dapat disajikan sebagaimana berikut:

Target :

1. BELANJA	: 11.043.341.331,00
 Belanja Operasi	: 10.794.141.331,00
a. Belanja Pegawai	: 6.399.627.462,00
b. Belanja Barang dan Jasa	: 4.394.513.869,00
 Belanja Modal	: 249.200.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: 249.200.000,00
- Jumlah Paket Belanja Barang Jasa	: 178
- Jumlah Paket Belanja Modal	: 11

Realisasi

1. BELANJA	: 10.602.612.361
 Belanja Operasi	: 10.602.612.361,00
a. Belanja Pegawai	: 6.323.652.607,00
b. Belanja Barang dan Jasa	: 4.055.932.854,00
 Belanja Modal	:
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: 223.026.900,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	: 0
- Jumlah Paket Belanja Barang Jasa	: 178
- Jumlah Paket Belanja Modal	: 11

Sedangkan realisasi untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2022

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	34 Orang	34 Orang
Kegiatan :			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan :			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1 Paket	1 Paket
Kegiatan :			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan :			

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan
Kegiatan :			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan :			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit	35 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79 Unit	79 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat 2. Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100,00%	100,00%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
Kegiatan :			
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen perencanaan Kota Denpasar	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan:			
Analisis Kondisi Daerah,Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 dokumen	1 dokumen
Koordinasi Penyusunan Penetapan DokumenPerencanaan Pembangunan DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/ota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen
Kegiatan :			
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan:			
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku
Kegiatan:			
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase capaian program pembangunan daerah	100,00%	100,00%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
Daerah			
Sub Kegiatan:			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	5 Laporan	5 Laporan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Dokuen Perencnaaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100,00%	100,00%
Kegiatan :			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100,00%	100,00%
Sub Kegiatan			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	8 Laporan	8 Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 Laporan	12 Laporan
Kegiatan			
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
SDA (Sumber Daya Alam)	Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar		
Sub Kegiatan :			
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	16 Laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	6 Laporan
Kegiatan :			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100,00%	100,00%
Sub Kegiatan :			
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 laporan	6 laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	18 Laporan

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022
JUMLAH		100,00%	

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 secara keseluruhan telah mencapai target kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2022.Pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan tersebut mendukung indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran strategis yang ada pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. Secara keseluruhan realisasi program,kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 telah tercapai 100% sehingga dari 3 program dan 10 kegiatan, tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 3 program, 10 kegiatan dan 18 sub kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan telah memenuhi target/kinerja yang ditetapkan Tahun 2022, antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dimana didalamnya terdapat 4 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan. Adapun persentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.242.218.164

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan didalamnya terdapat 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan Adapun presentase capaian kinerja telah memenuhi target kinerja yang direncanakan yaitu 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.421.818.905.

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan kedalam 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan yang dimana persentase capaian kinerja telah sesuai dengan target kinerja yang direncanakan yaitu sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **938.575.292**

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai berikut :

- Minimnya data dan tidak tertibnya laporan Perangkat Daerah akan sangat berdampak pada ketetapan waktu dalam proses dan penetapan dokumen perencanaan.
- Kemampuan dalam perumusan Kebijakan teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar masih belum maksimal
- Teknis perencanaan pembangunan Kota Denpasar masih belum maksimal.
- Kerjasama dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel masih lemah.
- Data base yang belum akurat dan terstruktur sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan.
- Bappeda tupoksinya mengkoordinasikan program kegiatan Perangkat Daerah, dilain pihak petugas perencana di Perangkat Daerah belum maksimal sehingga berdampak pada kinerja Bappeda sendiri.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tidak terdapat program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah

Implikasi atau dampak yang timbul dari target capaian program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

- Terhadap program/kegiatan yang realisasinya telah memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berdampak positif bagi kinerja perangkat daerah.
- Terhadap program/kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target kinerja yang sudah ditetapkan berdampak pada penyerapan anggaran Perangkat Daerah.

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Tindakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diuraikan seperti diatas adalah:

- A. Perencanaan akan dilakukan secara efektif dan efisien dan direncanakan untuk mengalokasikan anggarannya pada APBD induk.
- B. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat mengenai program/kegiatan lintas sektoral dan wilayah terutama yang pelaksanaannya diluar daerah.

Tabel 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Denpasar dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kota Denpasar

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
						(Kepmendagri 050-3708 Th 2020)				
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	34 orang	34 orang	100%
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan administrsi umum kantor	100%	100%	100%
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	100%	100%
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
5	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
5	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 Unit	35 Unit	100%
5	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79 Unit	79 Unit	100%
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat 2. Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100%	100%	100%
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan Dokumen perencanaan Kota Denpasar	100%	100%	100%
5	01	02	2	01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	2 dokumen	2 dokumen	100%
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/ota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase dokumen analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%
5	01	02	2	02	01	Penyusunan profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	100%
5	01	02	2	03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program pembangunan daerah	100%	100%	100%
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	5 Laporan	5 Laporan	100%
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan Dokuen Perencnaaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	100%	100%
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaa Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	100%	100%
5	01	03	2.	01	04	Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
						Perencanaan pembangunan Bidang pemerintahan				
5	01	03	2	01	08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Bidang pembangunan Manusia	Jumlah Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	100%	100%
5	01	03	2	02	04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%
5	01	03	2	02	08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	100%	100%
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
5	01	03	2	03	04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan	6 laporan	6 laporan	100%

KODE						URUSAN/ BIDANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENCANA (%)
5	01	03	2	03	08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewlyahan	Jumlah Laporan	18 Laporn	18 Laporn	100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

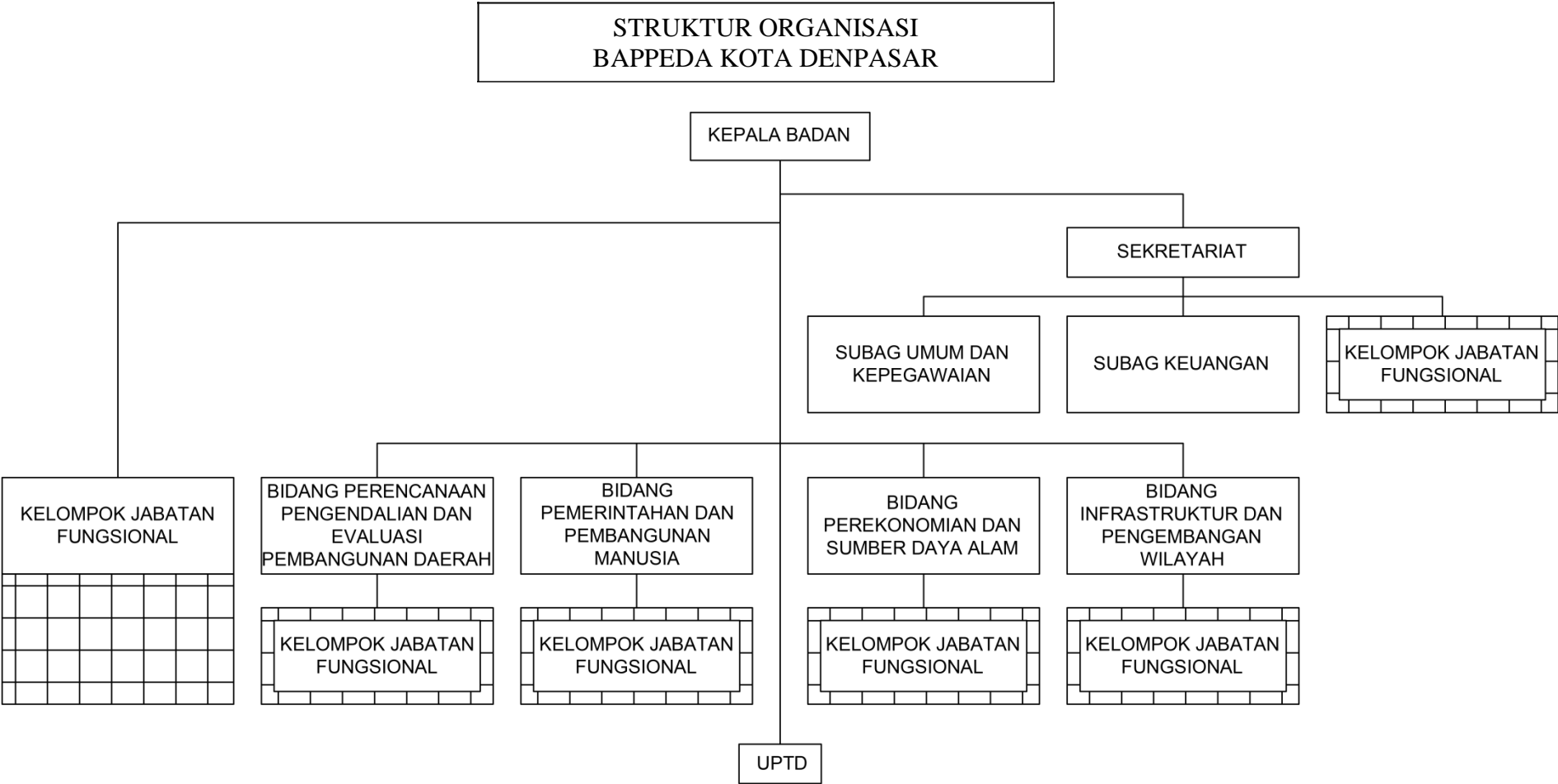
Berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Denpasar. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, sosial budaya, perekonomian, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan dan aparatur, pendataan dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan.
- Menyusun pedoman teknis perencanaan pembangunan, kriteria teknis, norma standar, prosedur dan manual.
- Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan program perencanaan pembangunan.

-
- Menyelenggarakan koordinasi dan pengenalan atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan.



Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kota Denpasar yang membantu Walikota Denpasar dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kota Denpasar mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan

perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kota Denpasar.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bappeda Kota Denpasar dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;

6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Denpasar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
1	Presentase Konsistensi Perencanaan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Presentase sinergitas perencanaan Kota Denpasar	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.1. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan , partisipatif dan akuntabel.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah :

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif , Tematik , Spasial belum optimal.
2. Sinergitas perencanaan pembangunan belum optimal
3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program
4. Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan aksesibel.

Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat.
- b. Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan kota Denpasar dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, dan dinamika perubahan.
- c. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
- e. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
- f. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi.

2.2. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Sesuai UU Nomor 25 tahun 2004, Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Denpasar disusun dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda Kota Denpasar dan mengacu kepada RKPD Kota Denpasar. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Pada tahun 2023 program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kota Denpasar terdiri dari 3 (Tiga) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan yaitu :

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kota
Denpasar

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Denpasar						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
No	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Penting
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	10.712.709.338	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.762.387.607	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	8.440.603.225	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Presentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	6.671.726.981	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 orang/bulan	8.440.603.225	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 orang/bulan	6.671.726.981	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	780.457.669	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Presentase pemenuhan layanan jasa umum kantor	100%	981.218.224	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	557.957.669	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	792.218.224	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	3 laporan	222.500.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	3 laporan	189.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor layanan jasa umum kantor	100%	432.511.788	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Presentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor layanan jasa umum kantor	100%	229.770.500	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	432.511.788	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	229.770.500	
	Pemeliharaan Barang Milik	Bappeda Kota	Persentase layanan	100%		Pemeliharaan Barang Milik	Bappeda Kota	Persentase layanan	100%	879.671.902	

	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Denpasar					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
No	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Penting
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	pemeliharaan barang milik daerah		1.059.136.656	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	pemeliharaan barang milik daerah			
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	526.417.912	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	463.756.388	
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	369.217.912	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Kota	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	261.842.546	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	163.500.832	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	154.072.968	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat 2. Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100%	3.121.036.218	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda Kota	1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat 2. Persentase Konsistensi penjabaran Program RPJMD pada RKPD	100%	3.206.027.996	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda Kota Denpasar	Persentase Pemenuhan Dokumen perencanaan Kota Denpasar	100%	2.916.731.218	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Bappeda Kota	Persentase Pemenuhan Dokumen perencanaan Kota Denpasar	100%	3.031.078.996	
	- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	120.649.784	- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	120.649.000	
	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	1.244.590.777	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	1.380.696.996	

	Review Terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2024 Kota Denpasar					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
No	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Penting
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1.551.490.657	- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1.529.733.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase capaian program pembangunan daerah	100%	67.514.000	Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	53.065.000	
	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	67.514.000	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	53.065.000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase dokumen analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	136.791.000	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase dokumen analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	121.884.000	
	- Penyusunan profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	136.791.000	- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	121.884.000	
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	1.311.128.802	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	1.119.914.840	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	131.921.607	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	184.411.452	
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1 Dokumen	131.921.607	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada	1 Dokumen	0	

	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Denpasar					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
No	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Penting
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		Pembangunan Manusia			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Bidang Pemerintahan			
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 laporan	131.921.607	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 laporan	184.411.452	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda Kota Denpasar	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	140.534.858	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda Kota Denpasar	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	131.266.952	
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 laporan	66.420.735	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 laporan	85.526.968	
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	54.114.123	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	45.739.984	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	1.038.672.337	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar	100%	804.236.436	
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	3 Dokumen	852.869.814	- Koordinasi Penyusunan Dokumen	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	602.918.000	

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Denpasar						Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan
No	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program /Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Penting
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)			
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Insfrastruktur	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	90.811.170,-	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infratsruktur	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	98.362.968	
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	94.991.353,-	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	102.955.468	
Total Pagu Indikatif					15.144.874.358	Total Pagu Indikatif					13.088.330.443

2.3. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan/sub kegiatan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom – up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi , baik dari kelompok masyarakat , LSM asosiasi – asosiasi , maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program dalam Renja Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar akan memverifikasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Dengan catatan program dan kegiatan yang diusulkan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar .

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Denpasar akan memverifikasi usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Dengan catatan program dan kegiatan yang diusulkan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Sedangkan terkait langsung dengan Bappeda Kota Denpasar tidak mengakomodir usulan para pemangku kepentingan.

Tabel 2.5.

Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Denpasar

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

No	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	

Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

No	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				
	- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	
	- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	
	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	
	Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				
	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
	- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen	
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	12 Laporan	

Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

No	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah Bidang Pembangunan Manusia		RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 tertuang Hal – hal sebagai berikut :

TEMA PEMBANGUNAN :

“MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”

PRIORITAS NASIONAL :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas & berdaya saing

4. Revolusi mental & pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik

Sedangkan yang menjadi Tema dan prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024 adalah:

“PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH.”

PRIORITAS :

1. Pertanian, kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Lingkungan Hidup
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tema dan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

“ MEMPERKUAT DAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH UNTUK DENPASAR MAJU”

Prioritas Pembangunan Tahun 2024 :

1. Pendidikan dan Kesehatan
2. Ekonom Kreatif, Pariwisata dan kebudayaan

3. Sosial dan ketenagakerjaan
4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
5. Reformasi Birokrasi

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Kota Denpasar Tahun 2024, Renja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024 tidak mendukung secara langsung prioritas Pembangunan Nasional maupun Kota, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, maka dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pencapaian arah kebijakan Nasional dan Provinsi serta Kota Denpasar tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi , rencana kerja dan pendanaan , baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama

produk berupa rencana pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappeda Kota Denpasar 2021 – 2026, adalah sebagai berikut :

TUJUAN :

“Terwujudnya Perencanaan pembangunan Kota Denpasar yang Berkualitas , Bersinergi dan Kredibel “

SASARAN :

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator Sasaran :

1. Presentase sinergitas perencanaan Kota Denpasar / 100%
2. Presentase konsistensi perencanaan /100%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Denpasar

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

No/Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Bappeda Kota Denpasar	100%	8.762.387.607	DAU dan PAD		100%	10.929.027.073
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah	Bappeda Kota Denpasar	100%	6.671.726.981	DAU dan PAD		100%	8.651.618.306
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bappeda Kota Denpasar	34 orang/bulan	6.671.726.981	DAU dan PAD		34 orang/bulan	8.651.618.306
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor	Bappeda Kota Denpasar	100%	229.770.500	PAD		100%	433.074.583
5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bappeda Kota Denpasar	12 Paket	229.770.500	PAD		12 Paket	433.074.583
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bappeda Kota Denpasar	100%	981.218.224	PAD		100%	789.469.111
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bappeda Kota Denpasar	3 Laporan	189.000.000	PAD		3 Laporan	217.812.500

No/Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bappeda Kota Denpasar	1 Laporan	792.218.224	PAD		1 Laporan	571.656.611
5	01	01	2	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah</i>	Bappeda Kota Denpasar	100%	879.671.902	PAD		100%	1.054.865.073
5	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bappeda Kota Denpasar	30 Unit	463.756.388	PAD		30 Unit	529.328.360
5	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bappeda Kota Denpasar	79 Unit	154.072.968	PAD		79 Unit	157.338.353
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bappeda Kota Denpasar	1 Unit	261.842.546	PAD		1 Unit	368.198.360
5	01	02	2			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat; Persentase Konsistensi Penjabaran RPJMD Pada RKPD	Bappeda Kota Denpasar	100%	3.206.027.996	PAD		100%	3.199.062.123
5	01	02	2	01		<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan Kota yang ditetapkan dengan Perkada dengan tepat waktu; Persentase pemenuhan dokumen kota Denpasar; Tolok ukur indikator kegiatan (Output)</i>	Bappeda Kota Denpasar	100% 100% 100%	3.031.078.996	PAD		100% 100% 100%	2.989.649.498
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda Kota Denpasar	2 Berita Acara	120.649.000	PAD		2 Berita Acara	123.666.029

No/Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Bappeda Kota Denpasar	5 Dokumen	1.380.696.996	PAD		5 Dokumen	1.275.705.546
5	01	02	2	01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Bappeda Kota Denpasar	2 Dokumen	1.529.733.000	PAD		2 Dokumen	1.590.277.923
5	01	02	2	03		<i>Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase capaian program pembangunan daerah; Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah</i>	Bappeda Kota Denpasar	100% 100 % 100 %	53.065.000	PAD		100% 100 % 100 %	69.201.850
5	01	02	2	03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Bappeda Kota Denpasar	5 Laporan	53.065.000	PAD		1 Laporan	69.201.850
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Bappeda Kota Denpasar	100% 100%	121.884.000	PAD		100% 100%	140.210.775
5	01	02	2	02	01	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Bappeda Kota Denpasar	1 buku	121.884.000	PAD		1 buku	140.210.775
5	01	03				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan	Bappeda Kota Denpasar	100% 100 %	1.119.914.840	PAD		100% 100 %	1.343.907.021

No/Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Dokumen Perencanaan Kota Denpasar; Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah							
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	100%	184.411.452	PAD		100%	135.219.647
5	01	03	2	01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Denpasar	12 laporan	184.411.452	PAD		12 laporan	135.219.647
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda Kota Denpasar	100%	131.266.952	PAD		100%	144.048.229
5	01	03	2	02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Bappeda Kota Denpasar	16 Laporan	85.526.968	PAD		16 Laporan	88.581.253
5	01	03	2	02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Bappeda Kota Denpasar	6 Laporan	45.739.984	PAD		6 Laporan	55.466.976
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappeda Kota Denpasar	100%	804.236.436	PAD		100%	1.064.639.145

No/Kode						Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Denpasar	3 Dokumen	602.918.000	PAD		3 Dokumen	874.191.559
5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Denpasar	6 Laporan	98.362.968	PAD		6 Laporan	93.081.449
5	01	03	2	03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Kota Denpasar	18 Laporan	102.955.468	PAD		18 Laporan	97.366.137

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan , yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappeda Kota Denpasar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Walikota Denpasar dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 , sereta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Rumusan rencana program , kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.

4.2. Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Kota

Memperhatikan arah kebijakan Nasional tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 serta Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Denpasar Tahun 2024, maka dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu mengkoordinasikan penyusunan , pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah , Bappeda Kota Denpasar tidak secara langsung mendukung Prioritas Kota Denpasar namun dalam kaitannya dengan pencapaian Program Prioritas Kota Denpasar dimaksud, Bappeda berperan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP (Nasional) dan RKPD (Provinsi) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana daerah , rencana kerja dan pendanaannya , baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada tahun 2024 program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kota Denpasar terdiri dari 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 18 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan yaitu :

Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar

No/Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	8.762.387.607
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah</i>	100%	6.671.726.981
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	6.671.726.981
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi umum kantor</i>	100%	229.770.500
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	229.770.500
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%	981.218.224
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	189.000.000

Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

No/Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	792.218.224
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah</i>	100%	879.671.902
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	463.756.388
6	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	154.072.968
7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	261.842.546
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi dan Pusat; Persentase Konsistensi Penjabaran RPJMD Pada RKPD	100%	3.206.027.996
	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	<i>Persentase dokumen perencanaan Kota yang ditetapkan dengan Perkada dengan tepat waktu; Persentase pemenuhan dokumen kota Denpasar; Tolok ukur indikator kegiatan (Output)</i>	1%00 100% 100%	3.031.078.996
8	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	120.649.000

Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

No/Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
9	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/ RKPD)	5 Dokumen	1.380.696.996
10	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1.529.733.000
	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Persentase capaian program pembangunan daerah; Persentase pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan; Persentase pemenuhan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah</i>	100% 100 % 100 %	53.065.000
11	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5 Laporan	53.065.000
12	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumenAnalisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Persentase pemenuhan analisa data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	100% 100%	121.884.000

Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

No/Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
13	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 buku	121.884.000
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Kota Denpasar; Persentase Konsistensi Penjabaran Program/Kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah kedalam Renja Perangkat Daerah	100% 100 %	1.119.914.840
	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	<i>Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	100%	184.411.452
14	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	12 laporan	184.411.452
	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	<i>Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	100%	131.266.952
15	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	85.526.968

Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

No/Kode	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
16	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	6 Laporan	45.739.984
	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	<i>Persentase Penjabaran Perencanaan Program Kegiatan Bidang infrastruktur dan kewilayahan</i>	100%	804.236.436
17	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	602.918.000
18	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	6 Laporan	98.362.968
19	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	18 Laporan	102.955.468

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah- kaidah pelaksanaan

Rencana Kerja Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024 , merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kota Denpasar secara bersama- sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya ;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Denpasar, 7 Agustus 2023
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Denpasar



I Putu Wiarta Wijaya Kusuma, ST, MT
Pembina Utama Muda

NIP :19671007 199703 1 004